BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jamak diketahui kota memiliki magnet bagi setiap masyarakat, terutama penduduk yang tinggal di desa. Suatu perkotaan selalu berkonotasi dengan kehidupan yang padat penduduk, gedung perkantoran, mall dan segala sarana dan prasarana yang tidak dapat dijumpai di desa.

Kota selalu dinilai mampu memenuhi hajat penduduknya. Segala keperluan apapun bisa tersedia secara lengkap. Tidak perlu ke kecamatan atau pergi ke pusat perbelanjaan seperti orang desa ketika hendak memenuhi segala kebutuhannya. Baik itu kebutuhan yang kerkaitan dengan hajat primer ataupun sekunder.

Kota selalu dianggap dapat memenuhi hajat ekonomi penduduknya. Kota selalu digambarkan sebagai tempat yang baik untuk mencari rizki. Anggapan ini tidak lepas dari keberadan sektor industri, perbelanjaan, perkantoran di kota. Kota seolah-olah memiliki magnet kuat untuk menarik penduduk desa melakukan urbanisasi. Mereka tertarik untuk melakukan mobilitas sosial dengan mengadu nasib ke kota. Apalagi mereka yang merasa memiliki kemampuan untuk bersaing dengan penduduk kota. Bahkan, penduduk desa yang tidak mempunyai keterampilan mencoba mengundi nasib ke kota-kota besar, seperti Surabaya yang merupakan ibu kota Jawa Timur.

Tentu saja, mobilitas ke kota ini juga bersinergi dengan semakin maju suatu negara yang diukur dengan pendapatan per kapita, semakin banyak pula

jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Indonesia merambat maju meski masih menyandang status sebagai negara berkembang.

Pada Desember 2014, peneliti berkesempatan mengunjungi kota Jiangmen Guangdom China bersama rombongan Pemkot Surabaya. Di kota yang berpenduduk sekitar empat juta manusia ini menjadi salah satu pusat industri di China bagian selatan. Mayoritas penduduknya tinggal di kota. Mereka bekerja di pabrik dan di perkantoran. Mereka tidak mencari rizki di jalanan. Masyarakat Jiangmen bekerja sebagai buruh pabrik.

Urbanisasi dapat terjadi dimana saja di seluruh dunia, meskipun pada laju yang berbeda. Populasi penduduk perkotaan di dunia sekarang hampir sama besarnya dengan jumlah penduduk pedesaan. Hal ini seiring dengan terus mengalirnya penduduk migran dari daerah pedesaan ke kawasan perkotaan. Urbanisasi merupakan salah satu proses perubahan sosial yang cepat daripada perubahan sosial lainnya. (Ever 1979:49).

Urbanisasi sebenarnya sudah terjadi sejak lama di Indonesia. Di Indonesia, gejala urbanisasi mulai tampak sejak tahun 1970-an. Dimana saat itu pembangunan sedang digalakkan, terutama di kota-kota besar. Fenomena urbanisasi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah:

- Perbedaan pertumbuhan antara desa dan kota. Serta ketimpangan fasilitas antara desa dengan kota dalam berbagai aspek kehidupan.
- 2. Sarana dan prasarana transportasi semakin meluas.
- Pertumbuhan industri di kota-kota besar yang banyak membuka peluang kerja.

4. Tetapi pada umumnya faktor ekonomi dianggap sebagai faktor utama menjadi pendorong arus urbanisasi. (Dhaifi dalam artikelnya, Permasalahan dan Solusi bagi Urbanisasi dan Over-Populasi di Kota-Kota Megapolitan, 2011).

Sedangkan Sugiono (2009) mengemukakan bahwa urbanisasi ditinjau dari sejarahnya yang sangat tua adalah proses perubahan yang diinginkan manusia untuk mempertahankan hidupnya menuju perbaikan nasib kehidupannya. Urbanisasi sendiri telah berlangsung sejak manusia ada di dunia.

Sugiono mencontohkan bahwa urbanisasi dilakukan sejak manusia nomaden merubah kehidupannya dengan menetap mengeksploitasi alam sehingga menciptakan pemukiman, pembentukan komunitas yang menciptakan pusat komunitas atau elit masyarakat. Dan pusat kekuatan sosial itu menjadi pusat penguasa, pimpinan, pelindung, pengembang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan baik melalui kepercayaan agama maupun rasionalisme serta pusat pelayanan pemukiman.

Kota dipandang sebagai pusat kemajuan. Evers (1982) tidak lagi memandang demikian. Kota bukan hanya menjadi pusat perkembagan peradaban. Lebih dari itu, kota menjadi tempat subur perkembangan problem-problem sosial. Mulai dari penyakit, buta huruf, kemiskinan dan kriminalitas. Urbanisasi di Asia Tenggara dipandang lebih rendah ketimbang Negaranegara lainnya.

Kota menjadi pusat dari kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, politik, kebudayaan dan kegiatan administrasi. Berbagai modal, industri, tenaga terampil, tenaga buruh kasar, fasilitas penunjang perdagangan, transportasi,

dan kedudukan pimpinan pemerintah dari berbagai tingkat berada di kota. (Rahardjo 2005:41).

Menurut Evers (1982) dalam kurun waktu 1970an, sekitar 70-80 persen penduduk Asia Tenggara masih tetap digolongkan sebagai penduduk pedalaman. Namun angka itu dari tahun-tahun sebelumnya mengalami penyusutan. Pada tahun 1950an, 86 persen penduduk Asia Tenggara yang tinggal di pedalaman. Angka itu mulai menurun pada tahun 1970-an menjadi 80 persen.

Secara teori, urbanisasi memang merupakan isu yang multisektor dan kompleks. Dari aspek demografi, urbanisasi merupakan suatu proses adanya perubahan persebaran penduduk di suatu wilayah. Hal ini menimbulkan dampak adanya kepadatan penduduk yang berimplikasi kepada masalahmasalah kesehatan dan problem lainnya. Secara ekonomi, urbanisasi bisa dilacak dari adanya perubahan struktural dalam sektor mata pencaharian. Secara sosiologis, terdapat perubahan sikap hidup dari pedesaan menuju sikap orang kota.

Nas (1979) mengemukakan diantara 906 juta penduduk dunia pada tahun 1800, 1,7% atau 15,6 juta penduduk yang mendiami perkotaan yang berpenduduk sekitar 100.000 orang. Sedangkan pada tahun 1960, sekitar 20% atau sekitar 590 juta dari 3 miliar penduduk dunia mendiami perkotaan. Antara 1800-1960 penduduk dunia telah menjadi tiga kali lipat.

Sedangkan penghuni kota-kota yang berpenduduk lebih dari 100.000 orang menjadi kira-kira 37 kali lebih besar. Maka pada tahun 1990 lebih dari separuh penduduk dunia yang tinggal di perkotaan. Banyak kota yang telah

berkembang menjadi kota juataan (*million-cities*). Nas berkesimpulan setelah bertambah tahun semakin besar penduduk dunia yang mendiami perkotaan. Kota-kota berkembang cukup pesat. Kota-kota besar akan menyebar di seluruh dunia.

Menurut Nas, ada perbedaan dan persamaan antara Negara-negara berkembang dan Negara maju dipadang dari segi cirinya dan bentuk fisiknya. Dari aspek ciri, Negara berkembang dan maju sama-sama memiliki jumlah kepadatan penduduk, letaknya di kawasan jaringan perhubungan. Sedangkan dari segi bentuk mereka berbeda. Terutama dalam sifat penduduknya dalam kegiatannya dan dalam tingkat kesejahteraannya.

Evers dan Rudiger (2002) memandang, sebagian besar penduduk di Asia Tenggara masih berwawasan desa. Mereka menganggap tinggal di kota merupakan hal yang istimewa. Disisi lain ada beberapa Negara di Asia Tenggara, juga terdapat kota-kota besar dengan jumlah penduduk berkisar jutaan orang, seperti Jakarta, Manila dan Bangkok. Penduduk yang sarat akan multi etnik mewarnai kependudukan di kawasan Asia Tenggara.

Menurut Evers dan Rudiger, Jakarta merupakan kota bekas jajahan Belanda yang sebelumnya terbentuk dengan nama Batavia. Sedangkan Singapura didirikan oleh Raffles dan Manila didirikan oleh Spanyol. Kotakota tersebut adalah salah satu dari beberapa kota besar yang berada di kawasan Asia Tenggara.

Ada dua pola utama urbanisme di Asia Tenggara yang berkaitan dengan pembentukan Negara. (Evers dan Rudiger, 2002:49).

- Kota-kota dagang yang umumnya terletak di daerah pesisir. Malaka merupakan jaringan perdagangan internasional.
- Kota-kota suci di pedalaman. Tempat ini diduduki oleh para raja, misalnya Kota Angor.

Dalam penjelasannya, Evers dan Rudiger menerangkan kedua macam kota ini terintegrasi ke dalam suatu sistem pembagian kerja luar negeri untuk konsumsi para elite, sedangkan kota suci pedalaman memasok beras dan barang-barang lain untuk konsumsi kota dagang.

Kota-kota dapat dikelompokkan atas tiga kategori besar, antara lain yaitu:

1. Kota dagang. Simpul hubungan perdagangan

Malaka adalah tempat para pedagang berkumpul dan berunding serta sebagai tempat berlabuh dan reparasi kapal. Di kota perdagangan seperti ini, kosmologi, agama dan ideologi tidak begitu dianggap penting dibandingkan perdagangan. Karena penduduknya multi etnik, kota dagang tentu saja heterogen. Stabilitas jalur perdagangan dan perniagaan merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan kota-kota dagang.

2. Kota-kota suci. Pusat kerajaan pedalaman

Kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara daratan bergantung pada pusat kekuasaan yang jelas. Berdasarkan pemahaman ini, pusat-pusat kecil lain dalam bentuk ibu kota provinsi yang berada di bawah subordinasi ibu kota Negara dan didefinisikan sebagai persinggahan saja bagi penguasa pusat.

3. Kota-kota kecil penghubung

Kota-kota kecil ini merupakan tempat persinggahan pejabat-pejabat pusat, baik pejabat pusat perdagangan atau pusat kerajaan. Fungsi kota

kecil ini adalah melayani pusat. Sejalan dengan hal itu, fakta menunjukkan bahwa di Asia tenggara, ditemukan *pertama*, kota-kota suci sebagai pusat kerajaan. *Kedua*, sistem kota perdagangan yang sentralisasinya terletak pada posisi sebagai simpul penghubung perdagangan. *Ketiga*, sistem ibu kota provinsi yang secara politik dan ideologis ditentukan oleh pusat yang sakral atau oleh posisiya dalam jaringan perdagangan. Dengan terlibatnya bangsa-bangsa Eropa dalam perekonomian Asia Tenggara, maka kota-kota dagang Asia Tenggara menjadi tempat tujuan. Hal itu disebabkan karena maksud utama bangsa Eropa adalah menguasai menguasai dan mengendalikan perdagangan.

Fenomena urbanisasi selalu terjadi di beberapa negara di dunia. Tidak menutup kemungkinan urbanisme terjadi di kawasan Asia Tenggara. Fakta menunjukkan Asia Tenggara merupakan kawasan yang lambat akan proses urbanismenya. Selain itu tingaktnyapun secara keseluruhan juga lebih rendah dari kawasan lain. Di Asia Tenggara angkatan kerja masih bergerak di sektor produksi pertanian. (Evers dan Rudiger 2002:42).

BPP Pemprov Jatim (2007) mengutarakan tahun 2006 jumlah penduduk di Jatim berjumlah 37.478.737. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2005 yang berjumlah 37.070.731. Sedangkan pada tahun 2004 berdasarkan data proyeksi P4B sejumlah 36.353.527 jiwa. Sementara pada tahun 2003 sejumlah 36.206.060. Sedangkan pada tahun 2002 sebanyak 35.930.460.

Diantara beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur, Surabaya memiliki proporsi jumlah penduduk terbanyak. Pada tahun 2006 jumlah penduduk

Surabaya mencapai 2.716.971 jiwa. Pada tahun 2004 sebanyak 2.675.158. Pada tahun 2003 sejumlah 2.660.381 jiwa.

Tabel I. 1 Jumlah Penduduk Surabaya 6 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah
1	2010	2.929.528
2	2011	3.024.321
3	2012	3.125.576
4	2013	2.896.744
5	2014	3.282.156
6	2015	2.896.721

Sumber: http://dispendukcapil.surabaya.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, Suharto Wardoyo mengemukakan bahwa perkembangan penduduk Surabaya selalu fluktuatif, bisa berkurang dan bertambah. Hal ini dikarenakan perkembangan penduduk di Kota Pahlawan selalu dinamis. "Setiap tahun itu ada yang pindah masuk dan pindah keluar, jadi angka hitungannya tidak pasti." (Suharto Wardoyo wawancara pada Senin 15 Juni 2015).

Tabel I.2 Jumlah Penduduk Masuk dan Keluar

No	Tahun	Pindah Masuk	Pindah Keluar
1	2013	58.998	18.726
2	2014	56.551	25.564
3	2015		
	1. Januari	4541	1697
	2. Februari	3907	1536
	3. Maret	4120	1672

Sumber Dispendukcapil Surabaya.

Kota Surabaya termasuk dalam deretan kota besar di Indonesia yang mengalami fenomena urbanisasi besar-besaran. Daya tarik ekonomi kota besar seperti Kota Surabaya menjadikan penduduk dari berbagai desa melakukan urbanisasi ke Kota Pahlawan. Pelaku urbanisasi meyakini Kota Surabaya akan memberikan peluang ekonomi yang besar. Cita-cita akan ketercukupan ekonomi bagian penting motivasi perpindahan penduduk desa ke kota. Surabaya menjadi kota besar dengan penduduk urban yang cukup banyak. Surabaya menjadi tujuan urbanisasi bagi penduduk di Jawa Timur.

Disamping faktor ekonomi, migrasi ke kota terjadi karena adanya perbedaan kemajuan antara kota dan desa. Kehidupan di kota yang lebihb aik, banyaknya kesempatan kerja yang bisa diperoleh di kota, mengundang penduduk desa untuk datang ke kota. Semakin besar kota, semakin tidak terkendalikan membesarnya perpindahan penduduk desa ke kota. Migrasi baru akan mengecil apabila perbedaan kota dan desa mengecil.

Gilbert dan Josep (2007) menulis tentang motivasi masyarakat menjadi penduduk migran di kota. Hampir semuanya yang melakukan urbanisasi adalah karena alasan ekonomi. Ketika masyarakat ditanya tentang alasan kepindahan mereka selalu saja prospek ekonomi perkotaan yag lebih baik menjadi alasan.

Urbanisasi sering terjadi pasca lebaran, terutama lebaran Idul Fitri.
Berbondong-bondong pendatang dari luar Kota Surabaya masuk ke Kota
Pahlawan untuk mengadu nasib.

Penelitian Ravenstein (1885) sebagaimana diungkap oleh Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jatim dalam bukunya Urbanisasi Berlebih di Kota-kota di Jatim (2007) bahwa hampir semua penduduk migrasi memilih pindah ke kota-kota yang tidak terlalu jauh dari tempat asalnya.

Fenomena urban ke Surabaya tidak bisa dihindari. Apalagi untuk kota besar yang menjadi pusat-pusat ekonomi. Rumusnya seperti gula dan semut. Di situ ada gula, pasti semut akan merubungnya. Kalau kota Surabaya terus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tentu akan merangsang orang berdatangan. Sebab, hanya di kota yang berkembang kemampuan dan tenaga kerja mempunyai peluang.

Orang yang berdatangan ke kota juga tidak sepenuhnya merugikan. Keberadaan mereka ikut menjadi bagian dari pertumbuhan. Pembangunan infrastruktur bermunculan, mulai dari perumahan, pertokoan sampai dengan infrastruktur jalan. Semuanya membutuhkan tenaga jasa yang di Surabaya sendiri tidak bisa mencukupinya. Maka, kedatangan para jasa pertukangan dan bangunan dari berbagai daerah ini bisa menguntungkan.

Tentu tidak hanya pertumbuhan ekonomi menjadi daya tariknya. Infrastruktur dan berbagai fasilitas pendukung kota itu juga sangat menentukan. Jika kota aman, nyaman dan tenteram, tentu orang-orang akan berdatangan. Jika pemerintah bisa memberikan layanan yang baik untuk pendatang, maka penduduk desa banyak yang datang.

Urbanisasi memiliki dampak tersendiri. Urbanisasi yang tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas maka timbullah problema, salah satunya masalah ekonomi yang akhirnya menjalar menjadi permasalahan-permasalahan sosial. Permasalahan yang timbul berupa kemiskinan, kesenjangan sosial dan lainnya.

Adanya penduduk miskin yang banyak dialami oleh penduduk urban dipicu oleh fakta bahwa tidak sedikit penduduk urban berasal dari tenaga tidak terdidik yang biasanya menjadi buruh kasar dan memperoleh penghasilan minim. Penghasilannya tidak cukup untuk membiyai anak dan istri. Langkah logis yang dilakukan untuk menekan pengeluaran akan menempati tempat yang biayanya murah bahkan tidak sedikit yang menempati stren kali. Penghasilan rendah tidak mampu memberikan kehidupan yang layak. Ketika hidup di lingkungan kumuh, potensi akan terjangkit penyakit semakin besar. Mereka juga tidak bisa hidup tenang karena tempat yang ditempati bisa digusur oleh Pemkot Surabaya.

Pada awal tahun 2015, sebanyak 73 kepala keluarga (KK) Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo harus kehilangan rumahnya. Rumah yang mereka diami bertahun-tahun digusur oleh karena menempati lahan bukan milik sendiri. Puluhan KK itu menempati lahan seluas 10 hektar milik orang lain. Pasca digusur, puluhan warga yang juga terdiri dari anak-anak tinggal di tenda-tenda darurat yang didirikan seadanya.

Mereka tinggal di tenda sederhana seperti di tempat penampungan sementara. Tenda tersebut tidak layak dipakai, selain hanya menggunakan terpal yang berlubang, juga tendanya terbuka. Sehingga ketika hujan mengguyur, tenda tersebut tidak bisa melindungi dari air hujan.

Selain masalah kemiskinan, penduduk urban dihadapkan dengan masalah yang sangat komplit. Salah satunya mereka akan beradaptasi dengan lingkungan sosial yang baru. Menjadi semakin komplit lingkungan sosial baru mereka sangat berbeda dengan kehidupan desa. Karakter atau tipologi

penduduk desa dengan penduduk kota tidak sama. Perbedaan itu disebabkan karena struktur masyarakat dan juga faktor tempat. Sangat kentara perbedaan penduduk kota dan desa. Dalam kehidupan sosial masyarakat yang tinggal di desa masih mengenal gotong royong. Di desa budaya gotong royong masih sangat kental.

Berkebalikan dengan desa, Cholil Mansyur menilai di kota tradisi gotong royong tidak menemui tempat. Budaya gotong royong atau solidaritas sosial antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota yang lainnya hampir tidak ada. Cara berinteraksi diantara anggota masyarakat dilakukan dengan cara perkumpulan dan lainnya.

Padahal, budaya gotong royong sangat mendekatkan antara keluarga yang satu dengan lainnya. Juga bisa mempererat hubungan emosi diantara para anggota masyarakat. Gotong royong merupakan tradisi yang belum atau tampak dipengaruhi oleh faktor lain. Dismaping budaya yang berbeda, pendidikan di desa terbelakang ketimbang di kota. Faktornya adalah akses pendidikan yang terbatas. Apalagi di pelosok-pelosok desa yang sangat terpencil jelas tidak mudah mendapatkan pendidikan yang bagus.

Tentu saja dalam bidang perekonomian juga berbeda. Hal ini bisa diteropong dari pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita di desa jauh ketimbang penduduk yang hidup di kota. Sehingga perbedaan ekonomi ini akan mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Secara logika, ketika pendapatan perkapita besar, maka tingkat kemampuan membelinya juga lebih besar. Begitupula sebaliknya jika pendapatan perkapita kecil. Orang-orang

yang memiliki pendapatan besar mampu membeli barang-barang mewah. Mereka mampu menjangkau harga barang yang mahal.

Bagaimanapun juga, urbanisasi adalah fenomena sosial yang pasti akan terjadi. Urbanisasi sudah ada sejak definisi kota itu ada. Kota tanpa urbanisasi adalah sekarat, kota mati. Kalau melihat sejarah perkembangan kota-kota besar dunia, di masa lampau dan sampai sekarang, tidak ada kota besar yang tidak berkembang tanpa bantuan urbanisasi.

Disadari atau tidak, perkembangan kota tidak lepas dari perkembangan daerah-daerah sekitarnya. Kota yang sombong dan memandang urbanisasi sebagai wabah penyakit adalah kota yang menafikan ketergantungannya terhadap daerah-daerah sekitar. Kota itu lupa bahwa keberhasilan kota tumbuh tidak lepas dari peran daerah sekitarnya.

Cara memberikan akses mudah antara kota dan daerah adalah salah satu cara <mark>untuk m</mark>aju bersama antara kota dan daerah. Sela<mark>ma ini a</mark>da pandangan yang salah kalau akses ke kota dari daerah begitu mudah, maka akan ada eksodus besar-besaran penduduk desa ke kota.

Ini tidak tepat, justru dengan adanya akses yang mudah, penduduk desa akan mudah ke kota dan juga akan mudah kembali ke desa. Akses yang mudah akan membuat kota menjadi sesuatu yang mudah dicapai dan bukan sebuah mimpi untuk dicapai.

Akses yang mudah antara kota dan desa (daerah) akan menghilangkan (setidaknya mengurangi secara signifikan) jurang perbedaan kemakmuran antara kota dan desa. Jika skema ini yang berjalan, mudik bukan lagi sesuatu yang mencemaskan. Bukan lagi ritual yang semata-mata menimbulkan beban

POTRET PENDUDUK URBAN DI SURABAYA

baru kota dan tidak hanya menjadi bagian ritual keagamaan setiap lebaran.

Tapi menjadi bagian dari redistribusi uang yang selama ini terpusat di perkotaan.

Urbanisasi terjadi akibat adanya faktor pendorong dan penarik yang menyebabkan masyarakat melakukan perpindahan ke daerah lain. Faktor yang dominan adalah masalah ekonomi. Dengan alasan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat berpindah dari satu daerah ke daerah lain yang dianggap mampu menyediakan sumber-sumber perekonomian yang baik.

Dalam buku Kesra Pemprov Jatim (2003), urbanisasi berlebih harus dikendalikan agar tidak berkembang liar dan membebani kota. Untuk mengantisipasi berkembangnya urbanisasi menjadi liar tidak cukup hanya dengan pendekatan "pintu tertutup" dan membatasi arus urbanisasi. Harus ada upaya-upaya positif untuk menekan arus urbanisasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga kesenangan kota dan desa tidak terlalu lebar.

Gilbert dan Gugler (2007) mengatakan, migrasi merupakan suatu perilaku yang sudah diterima di mana-mana, dan seringkali kiriman uang penduduk migran mewarnai orang-orang desa dengan apa yang mereka anggap sebagai kemewahan hidup.

Pemkot Surabaya berusaha menekan laju pertumbuhan penduduk musiman di Surabaya. Hal itu logis karena Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur sudah dipadati oleh masyarakat yang melakukan urbanisasi. Dengan kebijakan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) yang diberlakukan oleh Pemkot Surabaya melalui Dispendukcapil semua masyarakat migran harus tunduk dan patuh pada peraturan itu.

Regulasi itu dibuat lengkap dengan sanksi yang mengikuti. Jika tidak mentaati kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, maka siap-siap berhadapan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Aparat penengak peraturan daerah (perda) ini siap menggelandang penduduk musiman yang tidak memegang SKTS.

Kebijakan itu tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari kalangan DPRD Surabaya. Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono periode 2009-2014 menilai, urbanisasi dari daerah ke kota besar akan sulit dicegah. Hal itu karena belum tercipta pemerataan pembangunan disegala bidang. Kebutuhan lapangan pekerjaan terus bertambah dalam setiap tahunnya. Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pekerjaaan di manapun berada di wilayah NKRI.

Baktiono memandang urbanisasi merupakan hal yang wajar terjadi. Pemkot Surabaya sejak tahun 2014 memperketat kependudukan guna menekan jumlah warga pendatang yang biasanya ke Surabaya usai musim lebaran berakhir. Pemkot siap memulangkan warga pendatang yang tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal yang jelas.

Dalam setiap tahunnya jumlah urbanisasi terus bertambah utamanya bagi kalangan generasi muda dari daerah-daerah. Baktiono mengatakan, mengurangi urbanisasi memang tidak mudah, karena NKRI tidak bisa menolak rakyatnya untuk melakukan urbanisasi dalam rangka mencari pekerjaan di kota-kota besar.

Baktiono meminta Pemkot Surabaya cukup dengan melakukan perbaikan fasilitas perdagangan ke seluruh wilayah yang berimbas kepada terbukanya

lowoangan pekerjaan. Sehingga terjadi pemerataan di segala bidang tanpa terkecuali, termasuk didalamnya adanya perbaikan pada fasilitas perdagangan serta tersedianya lapangan pekerjaan.

Baktiono juga meminta agar pencegahan urbanisasi menjadi tanggung jawab bersama antara pemkot, pemkab, pemprop dan pusat. Jadi itu tidak dipikul oleh kota Surabaya yang menjadi salah satu kota tujuan bagi pendatang, ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pusat, tugas mereka adalah memunculkan potensi-potensi yang membuat penduduk urban tidak lagi datang ke kota tujuan. (Harian Duta Masyarakat pada tanggal 19 Agustus 2014).

Bidang pertanian memang mulai tidak diminati oleh generasi muda era sekarang. Karena, pertanian tidak bisa menjajikan penghasilan yang cepat dan memadai. Sehingga langkah untuk menjadi penduduk urban adalah solusi yang paling tepat. Mereka (generasi muda) harus diberi bekal yang cukup, seperti di daerah setempat dibangunkan sekolah pertanian, tentunya disesuaikan dengan karakter daerah itu sendiri, itu akan tercipta dengan sendirinya kualitas pertanian yang baik dan mendunia.

Di Kutisari Utara sering menjadi tempat jujukan penduduk pendatang. Wakil Ketua RW 2 Matraji menilai, dari tahun ke tahun angkat penduduk pendatang tidak ada angka yang pasti. Namun, dibandingkan beberapa RW di Kelurahan Kutisari, daerah Kutisari Utara dipadati oleh penduduk urban.

Matraji menilai, populasi penduduk asli dan penduduk pendatang sama banyaknya. Jika diibaratkan, penduduk asli jumlahnya 400 orang, maka penduduk pendatang tidak jauh-jauh dari angka tersebut. Keberadaan Kutisari

Utara yang berdekatan dengan Rungkut Industri menjadi penyebab utama. Para penduduk migran yang kerja di pabrik di kawasan Rungkut Industri tidak sedikit yang mencari tempat tinggal di Kutisari Utara.

Karena itu, fokus utama dalam penelitian ini adalah masalah sosial ekonomi penduduk urban di Kutisari Utara. Disamping banyak yang sukses, masih banyak yang gagal mengais rizki di kota. Penduduk urban juga dihadapkan dengan lingkungan sosial yang baru. Secara otomatis mereka dituntut mampu beradapatasi. Namun, tidak semuanya memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dengan lingkungan baru.

Urbanisasi adalah masalah bersama. Beberapa dampak positif, khususnya dalam konteks ekonomi dapat terus dioptimalisasikan. Namun, dampak-dampak negatif yang muncul semestinya menjadi perhatian serius. Bukan saja menjadi tanggung jawab kementerian terkait di tingkat pusat, tetapi juga memerlukan dukungan dan kapasitas pemerintahan di daerah atau Pemkot Surabaya.

B. Fokus Penelitian

- 1. Bagaimana potret kehidupan Penduduk urban di Kutisari Utara Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo?
- 2. Bagaimana keadaan sosial-ekonomi penduduk urban di Kutisari Utara?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui kehidupan sosial penduduk urban di Kutisari Utara.
- 2. Mengetahui keadaan sosial-ekonomi penduduk urban di Kutisari Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

- a. Bagian dari tanggung jawab akademik dan sosial yang termaktub dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi
- b. Usaha konkrit untuk mendistribusikan teori dalam realitas sosial.
- c. Sumbangan ide dan pemikiran dalam khazanah intelektual.

2. Bagi Akademisi

- a. Sebagai referensi akademis terkait dengan problem-problem sosial, terkhusus masalah urbanisasi.
- b. Untuk bahan pertimbangan dalam mengambil dan menentukan tema penelitian sosial selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

- a. Memberikan pemahaman dan gambaran jelas duduk permasalahan tentang urbanisasi.
- Membantu menganalisis problem urbanisasi di kota-kota besar.
 Sehingga, masyarakat tidak gampang melakukan mobilitas urbanisasi ke kota-kota besar seperti Surabaya.